



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT KOMISI XII DPR RI
(BIDANG: ESDM, LINGKUNGAN HIDUP, DAN INVESTASI)**

Tahun Sidang : 2024 – 2025
Masa Persidangan : I
Rapat : Ke – 13 (Tiga belas)
Jenis Rapat : Rapat Dengar Pendapat
Dengan : Kepala BPH Migas
Sifat Rapat : Terbuka
Hari, tanggal : Senin, 18 November 2024
Waktu : Pukul 10.00 WIB s.d Selesai
Tempat : Ruang Rapat Komisi XII DPR RI Gedung Nusantara I Lantai I
Acara :
1. Perkenalan
2. Progres dan Evaluasi Pelaksanaan Program hingga Triwulan ke-3 Tahun 2024
3. Program Strategis Tahun 2025
4. Lain-lain
Ketua Rapat : Bambang Patijaya., S.E., M.M
(Ketua Komisi XII DPR RI/ F.P. Golkar)
Sekretaris Rapat : Dwiyanti, S.Sos.
Hadir : A. Pemerintah
- Kepala BPH Migas beserta jajarannya
B. 19 Orang Anggota dari 45 Orang Anggota Komisi XII DPR RI, terdiri dari:
19 Orang Anggota Komisi XII DPR RI hadir fisik
26 Orang Anggota Komisi XII DPR RI izin

I. PENDAHULUAN

1. Rapat Dengar Pendapat Komisi XII DPR RI pada hari Senin, 18 November 2024 dibuka pukul 10.15 WIB, dipimpin oleh Bambang Patijaya., S.E., M.M, selaku Ketua Rapat Komisi XII DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum.
2. Ketua Rapat menyatakan agenda Rapat Dengar Pendapat Komisi XII DPR RI dengan agenda pembahasan:
 - a) Perkenalan
 - b) Progres dan Evaluasi Pelaksanaan Program hingga Triwulan ke-3 Tahun 2024
 - c) Rencana Program Kerja 100 hari
 - d) Program Strategis Tahun 2025
 - e) Lain-lain
3. Rapat Dengar Pendapat Komisi XII dilanjutkan oleh Putri Zulkifli Hasan, Wakil Ketua Komisi XII DPR RI dari Fraksi PAN.

II. KESIMPULAN RAPAT

1. Komisi XII DPR RI meminta BPH Migas untuk memperketat pengendalian dan pengawasan penyaluran BBM bersubsidi dengan melibatkan masyarakat agar lebih tepat sasaran serta menjamin ketersediaan pasokan BBM khususnya untuk nelayan dan petani.
2. Komisi XII DPR RI meminta BPH Migas untuk menyampaikan temuan-temuan terkait penyimpangan penggunaan BBM bersubsidi, rekomendasi pengawasan BPH Migas per provinsi, serta data pembagian kuota BBM bersubsidi di semua lembaga penyalur.
3. Komisi XII DPR RI bersepakat dengan Kepala BPH Migas agar BPH Migas menjadi mediator antara PT Pertamina Patra Niaga, SPBU, dan transportir untuk mengurangi potensi penyimpangan BBM bersubsidi selama proses pengiriman.

4. Komisi XII DPR RI meminta Kepala BPH Migas untuk menyampaikan jawaban tertulis atas seluruh pertanyaan Anggota Komisi XII DPR RI dan disampaikan paling lambat pada tanggal 25 November 2024.

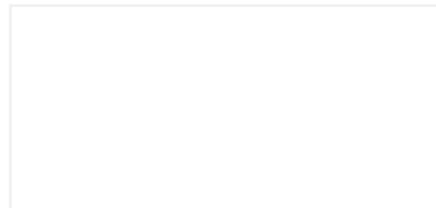
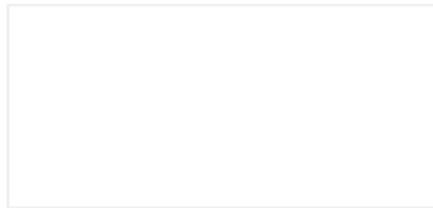
III. PENUTUP

Rapat ditutup Pukul 12.45 WIB

Jakarta, 18 November 2024

KEPALA BPH MIGAS

KETUA RAPAT,



ERIKA RETNOWATI, A.K., M.Si.

PUTRI ZULKIFLI HASAN, S.Mn., M.Bus

A-497